

K/c  
Dag 06/01  
Yud  
P

# SKRIPSI

*SRI PENI YUDAWATI*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS DALAM PELAKSANAAN MERGER  
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PELAKSANAAN MERGER**

**(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS)**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT  
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**  
**NIP. 130325843**

**Penyusun,**

**Sri Peni Yudawati**  
**NIM. 039714559**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 6 Juli 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.**

**Anggota : 1. H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**

**2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**

**3. Sri Woelan Azis, S.H.**

**4. Rahmi Jened, S.H., M.H.**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting termasuk juga jika terjadi pelaksanaan merger. Dengan pemungutan suara terbanyak itu, pemegang saham minoritas yang mempunyai jumlah suara lebih kecil tentu akan kalah suara dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yang mempunyai jumlah suara yang lebih besar. Sehingga menyebabkan pemegang saham minoritas tidak bisa mempertahankan haknya bila kepentingannya dirugikan dalam pelaksanaan merger. Sehingga perlu sarana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang berada dalam posisi lemah.
- b. Pemegang saham minoritas mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh para pihak baik direksi, komisaris, perseroan pemegang saham mayoritas dan pihak lain yang terkait dan tidak boleh merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dalam rangka pelaksanaan merger. Dan hak-hak itu mencakup hak atas



namanya sendiri atau hak perseorangan dan hak atas nama perseroan atau hak derivatif.

- c. Disamping itu pemegang saham minoritas juga dapat mengajukan tuntutan berupa sanksi pidana kepada perseroan yang merugikannya berdasarkan pasal 84 UUPT jo pasal 391 KUHP.

## 2. Saran

- a. Perlu adanya pengenaan sanksi yang berat dan tegas terhadap para pelaku yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger baik pihak direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan pihak lain yang terlibat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun secara pidana agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap pemegang saham minoritas.
- b. Perlu adanya suatu pengaturan hukum yang lebih khusus mengenai hak dan kewajiban pemegang saham terutama pemegang saham minoritas agar dalam pelaksanaannya, merger tetap memperhatikan hak-hak dan tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas sehingga ada kejelasan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.